

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemerintah Indonesia melalui berbagai institusi yang telah ditugaskan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun Pihak Kepolisian Republik Indonesia meskipun tidak memiliki satu kesatuan struktur organisasi tetapi saling memiliki kerjasama dan saling berhubungan. Pemerintah Indonesia memiliki banyak Kedutaan Besar Republik Indonesia yang tersebar di seluruh negara yang bekerjasama dengan Indonesia, salah satunya adalah KBRI Kuala Lumpur, di Malaysia. Dalam struktur organisasi baik KBRI, NCB Interpol maupun Mabes Polri disatukan oleh tugas dari Atase Polri yang memiliki keterikatan baik untuk menjaga keamanan dari pihak kepolisian Indonesia, memiliki unsur diplomatis untuk menjaga dan meningkatkan hubungan kerjasama khususnya dalam keamanan antar negara. Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia akan ditindak langsung oleh Bareskrim Polri. Namun, jika hal ini terjadi di luar wilayah Indonesia maka alurnya akan melalui KBRI yang ditangani oleh Atase Polri, kemudian dilaporkan ke Kemenlu dan NCB Interpol juga Mabes Polri untuk diteruskan ke Bareskrim. Upaya Pemerintah Indonesia pasca terjadinya kasus perdagangan manusia adalah, pengamanan di area perbatasan, penyelesaian kasus, pendampingan bagi korban perdagangan manusia untuk di rehabilitasi bagi pemulihan kondisi kejiwaannya, hingga proses hukum yang seharusnya dilakukan.

Kasus perdagangan manusia, merupakan kasus yang cukup penting dan sangat mempengaruhi tujuan maupun kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan dan melindungi warga negaranya. Sehingga pemerintah Indonesia melakukan kerjasama yang dilakukan baik melalui institusi –institusi pemerintahan maupun non pemerintahan seperti ILO, ASIAN FOUNDATION maupun institusi lain untuk saling mendukung dalam rangka mencegah, mengurangi dan menyelesaikan serta mendampingi korban dalam kasus perdagangan manusia yang terjadi khususnya di perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kerjasama baik yang bersifat nasional, regional maupun Internasional tidak hanya mempengaruhi kebijakan dalam negeri Indonesia melainkan juga berpengaruh dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia khususnya dalam menentukan sikap maupun tindakan terhadap negara lain dalam hal ini adalah Malaysia

sebagai negara yang berbatasan langsung dalam menangani kasus perdagangan manusia bersama dengan Indonesia melalui KBRI maupun Kepolisian.

6.2 Saran

Pemerintah Indonesia, tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik tanpa adanya peran masyarakat yang turut aktif melaporkan kasus perdagangan manusia yang terjadi. Selain itu peran media juga sangat dibutuhkan, dalam hal menyelesaikan kasus perdagangan yang terjadi. Semakin media meningkatkan fokus terhadap kasus perdagangan yang sedang terjadi, hal itu akan meningkatkan kinerja Pemerintah Indonesia dalam mengawal dan menyelesaikan secara tuntas kasus perdagangan manusia yang terjadi. Dibutuhkan kontrol dan aksi yang nyata dari berbagai pihak untuk bekerjasama dan menghindari adanya kasus perdagangan manusia. Salah satunya adalah peran Pemerintah Indonesia dalam menegaskan kembali dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Kurangnya pengetahuan akan dokumen-dokumen perjalanan juga merupakan salah satu hal yang kemudian menjadi celah bagi para tersangka untuk melakukan perdagangan manusia.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah, sejauh mana kemudian Pemerintah Indonesia mengupayakan WNI untuk tidak terlibat kasus perdagangan manusia sebelum terjadinya kasus perdagangan manusia dari berbagai kalangan.